

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki aktivitas ekonomi terbesar. Indonesia termasuk negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Hal ini tercatat dalam basis data *World Economic Outlook* edisi Oktober 2023 disitus web IMF. IMF mengukur perekonomian negara-negara berdasarkan proyeksi nilai produk domestik bruto (PDB). Pada 2023, nilai PDB Indonesia diproyeksikan bisa mencapai US\$1,4 triliun. Angka itu setara dengan 1,4% dari total PDB global. Indonesia sangat potensial untuk menjadi suatu negara dengan ekonomi skala besar di dunia. Hal ini karena Indonesia memiliki sumber daya alam, sumberdaya manusia, stabilitas makro ekonomi, dan iklim investasi yang kondusif. Namun, Indonesia masih menghadapi permasalahan sosial yang serius yaitu kemiskinan dan pengangguran. Maka pemerintah melakukan upaya penanggulangan masalah sosial tersebut melalui pemberdayaan, khususnya melalui peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).¹

Usaha mikro kecil dan menengah dapat didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan besar. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja serta dapat memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dapat berperan

¹ Permana, S. H. (2017). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. 1-2.

dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

UMKM memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional yaitu penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi perdesaan, peningkatan ekspor nonmigas, serta peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).²

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia setara dengan Rp.9.580 triliun dan UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja.³

Tabel 1. 1
Data UMKM Di Indonesia Tahun 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (juta)	64,19	65,47	64	65,46	65	66
Pertumbuhan %		1,98 %	-2,24 %	2,28%	0,70%	1,52%

Sumber: Kadin Indonesia

Pada Tahun 2018 jumlah UMKM Indonesia tercatat sebesar 64,19 juta unit dan mengalami peningkatan di tahun berikutnya menjadi 65,47 juta unit. Namun, pada tahun 2020 jumlah UMKM mengalami penurunan menjadi 64 juta unit yang

² Alifah fidela, a. p. (2020). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Program Pemasaran Desa Jambu Raya di Desa Jambu, Kabupaten Sumedang. *jurnal Pusat Inovasi Masyarakat* , 493–498 .

³ Kadin Indonesia . (2024, JULI 8). Retrieved from <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkmindonesia>

kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak usaha khususnya UMKM terhenti atau berkurang aktivitasnya. Setelah itu, pada tahun 2021 jumlah UMKM kembali meningkat menjadi 65,46 juta unit. Meskipun demikian, pada tahun 2022 jumlah UMKM mengalami penurunan yang relatif kecil menjadi 65 juta unit. Pada tahun 2023 jumlah UMKM kembali mencatatkan angka positif yakni 66 juta unit. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang stabil meskipun tantangan ekonomi masih ada.

Salah satu kunci keberhasilan usaha mikro, kecil dan menengah adalah tersedianya pasar yang jelas bagi produk UMKM disamping promosi, branding, dan minat berwirausaha. Sementara itu kelemahan yang dihadapi UMKM dalam bidang pemasaran adalah orientasi pasar rendah, lemah dalam persaingan yang kompleks dan tajam, serta tidak memadainya infrastruktur pemasaran.⁴ Menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif merupakan penguasaan pasar sebagai prasyarat meningkatkan daya saing. Menyadari pentingnya keberadaan dan kontribusi UMKM, maka pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang didalamnya mengatur mengenai upaya-upaya pemberdayaan, pengembangan, pembiayaan dan penjaminan. UMKM dapat dikelola atau dikembangkan serta dapat meningkatkan pendapatan daerah.⁵

⁴ Paulus Lucky Tirma Irawan, K. R. (2020). Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Implementasi E-. 2-3.

⁵ Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah

Pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis dari setiap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maka berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelenggarakan peraturan yang mengatur tentang kegiatan perekonomian untuk meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM dengan memberikan izin usaha bagi para pelaku usaha untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, melakukan pengembangan usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha.⁶ Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah dapat dikembangkan sebagai upaya untuk memutus mata rantai angka pengangguran di daerah yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Keberadaan Koperasi dan UMKM di daerah memberikan peluang besar untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat.

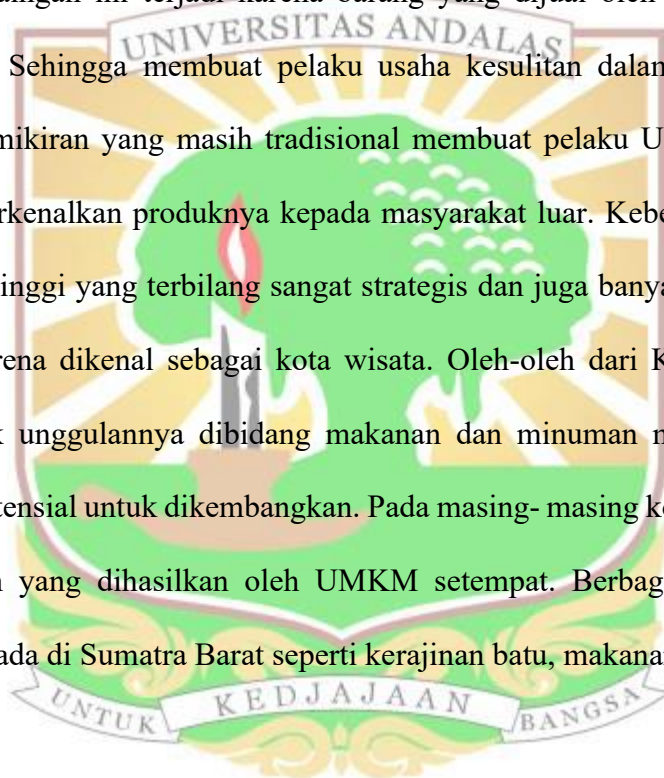
Masyarakat Sumatera Barat terkenal dengan budaya berwisata. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tempat wisata di Sumatera Barat. Salah satu kota yang memiliki jumlah kunjungan wisatawan tertinggi dan populer di Sumatera Barat yaitu Kota Bukittinggi. Hal ini didukung oleh data BPS Tahun 2022 yang mencatat sebanyak 1.231.306 wisatawan mengunjungi Kota Bukittinggi. Jumlah ini meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah 748.074 wisatawan⁷. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi menjadi destinasi favorit bagi para

⁶ Wilfarda Charismanur Anggraeni, W. P. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *journal of Government and Politics (JGOP)*, 50

⁷ Dicko rifki delpiero.2024.Pengaruh Pemasaran Media Sosial, Orientasi Pasar, dan Inovasi Produk Terhadap Kinerja Pemasaran UMKM Rumah Makan Di Kota Bukittinggi. Skripsi Program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

wisatawan. Sehubungan dengan itu Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota tempat pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah. UMKM yang ada di Kota Bukittinggi sangat beragam seperti industri pangan, sandang, kimia, bahan bangunan, logam, elektronika, dan kerajinan.

Masyarakat Kota Bukittinggi banyak menjadi pelaku UMKM, yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang ketat antara para pelaku UMKM. Ketatnya persaingan ini terjadi karena barang yang dijual oleh pelaku UMKM hampir sama. Sehingga membuat pelaku usaha kesulitan dalam meningkatkan penjualan. Pemikiran yang masih tradisional membuat pelaku UMKM kesulitan dalam memperkenalkan produknya kepada masyarakat luar. Keberadaan UMKM di Kota Bukittinggi yang terbilang sangat strategis dan juga banyak diminati oleh wisatawan karena dikenal sebagai kota wisata. Oleh-oleh dari Kota Bukittinggi seperti produk unggulannya dibidang makanan dan minuman menjadi peluang usaha yang potensial untuk dikembangkan. Pada masing- masing kota memiliki ciri khas makanan yang dihasilkan oleh UMKM setempat. Berbagai macam jenis UMKM yang ada di Sumatra Barat seperti kerajinan batu, makanan, dan bordir.



Tabel 1. 2
Jumlah UMKM Kab/ Kota Provinsi Sumatra Barat 2019

NO	Kab/Kota	Jumlah UMKM
1	Kab. Agam	15.192
2	Kab. Dharmasraya	7.770
3	Kab. Kepulauan Mentawai	1.215
4	Kab. Lima Puluh Kota	2.660

5	Kab. Padang Pariaman	2.114
6	Kab. Pasaman Barat	2.662
7	Kab. Pasaman	7.550
8	Kab. Pesisir Selatan	6.968
9	Kab. Sijunjung	1.678
10	Kab. Solok Selatan	982
11	Kab. Solok	12.864
12	Kab. Tanah Datar	4.718
13	Kota Bukittinggi	7.015
14	Kota Padang Panjang	14.069
15	Kota Padang	11.365
16	kota Pariaman	7.055
17	Kota Sawahlunto	3.596
18	Kota Payakumbuh	944
19	Kota solok	3.271
	Total	113.688

Sumber: Database Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar

Pertumbuhan UMKM di Sumatera Barat tentunya tidak terlepas dari dukungan setiap daerah baik dari tingkat kota maupun kabupaten. Kota Bukittinggi di Sumatera Barat merupakan salah satu kota yang ikut berkontribusi dalam perkembangan UMKM. Pada tabel diatas Kota Bukittinggi termasuk dalam 10 UMKM terbanyak di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut tidak luput dari adanya permasalahan yang timbul dalam perjalanan program UMKM di Kota Bukittinggi. Permasalahan tersebut perlu ditangani secara serius agar potensi UMKM di Kota Bukittinggi dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM memerlukan dukungan pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam perkembangan usaha. Beberapa hambatan yang sering terjadi yaitu keterbatasan modal dan teknik pemasaran yang belum memadai. Dalam upaya mengatasi hambatan tersebut maka dukungan pemerintah sangat besar untuk perkembangannya. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan bantuan pendampingan atau pelatihan pemasaran bagi pelaku UMKM dan pemerintah juga dapat memberikan bantuan modal bagi para pelaku UMKM.

Tabel 1. 3
Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Perkecamatan
di Kota Bukittinggi

	Kecamatan	Aur Birugo Tigo Baleh			Guguak Panjang			Mandiangan Koto Selayan			Jumlah
	Kriteria Usaha	Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah	
Tahun	2019	1.872	162	8	2.431	315	19	1.710	175	4	6.696
	2020	1.343	162	8	2.091	315	19	3.337	175	4	7.454
	2021	1.505	13	0	2.406	28	0	3512	9	0	7.473
	2022	1.505	13	0	2.406	28	0	3512	9	0	7.473
	2023	1.505	13	0	2.406	28	0	3512	9	0	7.473

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Kota Bukittinggi memiliki jumlah UMKM sebanyak 36.569. Peningkatan jumlah pelaku UMKM pada Tahun 2019-2020 mengalami peningkatan sebanyak 758 UMKM. Selanjutnya, pada tahun 2020-2021 hanya mengalami peningkatan jumlah UMKM sebanyak 19 orang dan pada tahun 2021- 2023 tidak mengalami peningkatan jumlah UMKM. Pada tahun 2023 kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh memiliki UMKM paling sedikit sebanyak 1505 UMKM dan untuk meningkatkan daya saing UMKM Kota Bukittinggi mengeluarkan Program Pedang Tigo.

Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi mengeluarkan Program Pedang Tigo yang bertujuan untuk peningkatan daya saing UMKM melalui 3 GO (*Go standard, Go digital, Go export*) yang dilatar belakangi oleh rendahnya daya saing UMKM Kota Bukittinggi dibandingkan dengan daerah lain. Rendahnya daya saing UMKM Kota Bukittinggi baik skala internasional maupun nasional dapat dilihat dari rendahnya persentase kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), rendahnya standarisasi kualitas produk, serta belum adanya produk UMKM yang menembus pasar Internasional.⁸ Peraturan yang mengatur tentang peningkatan daya saing UMKM yaitu Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 3 D tentang peningkatan daya saing usaha mikro.⁹

Kondisi yang menyebabkan rendahnya daya saing UMKM saat ini yang pertama yaitu omset penjualan tidak stabil karena pemasaran produk hanya secara *offline* sehingga bergantung pada musim liburan. Kota Bukittinggi merupakan kota

⁸ Nauli Handayani, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi tahun 2021-2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, 19 Juli 2024 pukul 09.19 WIB

⁹ Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2019 pasal 3 D Tentang Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro

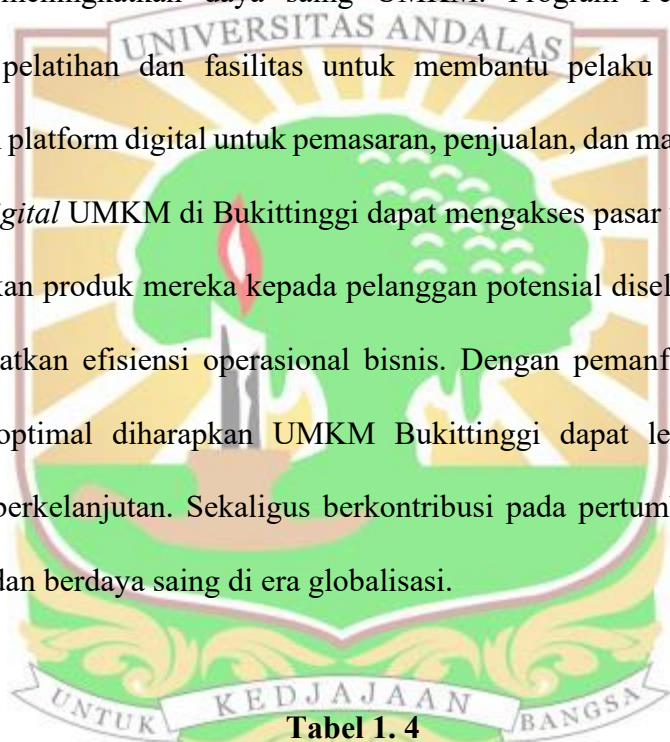
wisata yang ramai dikunjungi para wisatawan pada musim libur. Dampaknya para UMKM di Kota Bukittinggi memiliki ketergantungan pada para pembeli musiman tersebut, yang mengakibatkan ketidaksatabilan omzet penjualan pada UMKM. Kedua, masih rendahnya jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha dan sertifikat produk.

Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman UMKM terhadap proses pengajuan perizinan yang dianggap sulit dan berbelit-belit. Dampaknya masih banyaknya UMKM yang belum memiliki legalitas usaha dan hal ini dapat menyebabkan kurangnya perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bukittinggi membentuk program Pedang Tigo yang terdiri dari *Go standard, Go digital, dan GO export*. Pertama *Go Standard* merupakan Program Pedang Tigo yang digagas oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM di kota tersebut melalui penerapan standar yang lebih baik dalam manajemen, produk, dan layanan. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses ke berbagai fasilitas yang dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk dan usahanya.

Dengan adanya *Go Standard* diharapkan UMKM di Bukittinggi dapat lebih berdaya saing baik di pasar lokal maupun nasional serta mampu menghadapi tantangan global. Inisiatif ini juga mendukung pengembangan kewirausahaan yang inklusif, memperkuat perekonomian daerah, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Sehingga membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi secara keseluruhan. *Go standard* merupakan kegiatan yang dilakukan pelaku UMKM dimulai dari pengolahan produk dan proses menciptakan barang dan

jasa. Jasa hasil dari produk harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan untuk barang seperti ISO (*The International Organization For Standardization*), dan sertifikasi pengolahan produk.

Kedua *Go Digital* Program Pedang Tigo yang diluncurkan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi bertujuan untuk mendorong UMKM di kota Bukittinggi agar beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital guna meningkatkan daya saing UMKM. Program Pedang Tigo ini menyediakan pelatihan dan fasilitas untuk membantu pelaku UMKM dalam memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, penjualan, dan manajemen bisnis. Melalui *Go Digital* UMKM di Bukittinggi dapat mengakses pasar yang lebih luas, memperkenalkan produk mereka kepada pelanggan potensial diseluruh Indonesia, serta meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Dengan pemanfaatan teknologi digital yang optimal diharapkan UMKM Bukittinggi dapat lebih kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan. Sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing di era globalisasi.



Tabel 1. 4
Data UMKM yang Telah Menggunakan Digitalisasi

Tahun	Jumlah
2022	1046
2023	3218
Jumlah	4264

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaku UMKM di Kota Bukittinggi yang telah memanfaatkan teknologi informasi sudah meningkat. Pada setiap tahunnya dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terdapat 1046 jumlah UMKM dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 3218 pelaku UMKM yang menggunakan digitalisasi dalam pemasaran produknya. Peningkatan ini merupakan sebuah dampak positif yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam melakukan sosialisasi terhadap penggunaan digitalisasi pada pelaku UMKM.

Pemerintah Kota Bukittinggi juga membantu memfasilitasi para UMKM untuk mempromosikan produk mereka di *e-katalog* pemerintah Kota Bukittinggi tanpa dipungut biaya. Hal ini dilakukan untuk memperluas pasar para UMKM jadi tidak hanya bergantung pada penjualan secara langsung di pasar tradisional tetapi juga memanfaatkan perkembangan era digital saat ini yang dapat mempermudah pelaku UMKM untuk meningkatkan omsetnya.

Ketiga *Go Export Program Pedang Tigo* yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi bertujuan untuk membuka peluang ekspor bagi UMKM di Kota Bukittinggi sehingga mereka dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, serta akses informasi terkait prosedur ekspor, regulasi, dan peluang pasar global. Dengan mendukung UMKM dalam proses ekspor *Go Export* berupaya membantu pelaku usaha Bukittinggi memperluas pasar mereka, meningkatkan kualitas produk, serta membuka sumber pendapatan baru yang lebih luas. Melalui program ini, diharapkan UMKM Bukittinggi dapat bertransformasi menjadi pemain

global yang kompetitif, memperkuat perekonomian daerah, dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. 5
Data UMKM Yang Telah Melakukan Export

Tahun	Jumlah
2022	63
2023	84
Jumlah	147

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas, jumlah UMKM yang telah melakukan ekspor di Kota Bukittinggi mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 63 UMKM yang berhasil melakukan ekspor. Angka ini mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2023 di mana jumlah UMKM yang melakukan ekspor mencapai 84 UMKM. Secara keseluruhan, jumlah UMKM yang telah melakukan ekspor selama periode 2022-2023 mencapai 147 UMKM. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kapasitas UMKM untuk menjangkau pasar internasional maupun nasional yang mencerminkan adanya peluang pertumbuhan yang lebih besar bagi UMKM di Kota Bukittinggi untuk mengembangkan usahanya di pasar global.

Dengan hadirnya Program Pedang Tigo, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang berada di Kota Bukittinggi, mendapatkan peluang yang lebih luas untuk mengembangkan serta memperluas jaringan usahanya. Program ini menjadi salah satu bentuk dukungan konkret dari pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam

upaya meningkatkan daya saing UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Keikutsertaan dalam program Pedang Tigo juga tergolong mudah dan terbuka bagi pelaku UMKM yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon peserta program adalah memiliki legalitas usaha yang sah, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha dari kelurahan, serta pelaku usaha harus aktif menjalankan usahanya.

Kemudahan syarat ini bertujuan untuk mendorong partisipasi UMKM agar bisa lebih terfasilitasi dalam berbagai kegiatan seperti pelatihan, promosi digital, hingga potensi ekspor produk. Dengan demikian, program Pedang Tigo diharapkan mampu menjadi jembatan yang efektif dalam meningkatkan kapasitas, kualitas, dan akses pasar UMKM di Kota Bukittinggi secara berkelanjutan.

Pedang Tigo merupakan program yang dibuat sebagai perwujudan untuk mendukung misi dari Wali Kota Bukittinggi yaitu mewujudkan Bukittinggi yang hebat dalam sektor ekonomi kerakyatan, Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi membuat Program Pedang Tigo yang didirikan pada April tahun 2022 yang saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 Tahun¹⁰. Program Pedang Tigo ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2019 pasal 3 d tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

Tujuan dibentuknya Program Pedang Tigo oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi adalah untuk meningkatkan daya saing UMKM di Kota Bukittinggi dengan memberikan dukungan yang komprehensif dalam aspek

¹⁰ <https://www.beritaminang.com/berita/18437/dinas-koperasi-ukm-perdagangan-bukittinggi-lakukan-peningkatan-daya-saing-umkm-melalui-tiga-go> Di akses 21 Agustus 2024

pengembangan kapasitas, akses pasar, dan inovasi produk. Program ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM agar lebih siap menghadapi tantangan pasar, baik lokal, nasional, maupun internasional. Melalui berbagai inisiatif seperti pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses ke teknologi serta pasar digital. Program Pedang Tigo diharapkan dapat menciptakan UMKM yang lebih produktif, efisien, dan kompetitif. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, sehingga tercipta ekosistem bisnis yang lebih kuat dan berkelanjutan di Kota Bukittinggi.

Selain itu, motivasi Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi membuat program pedang tigo ini berdasarkan fenomena dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti standarisasi. Banyaknya UMKM yang memproduksi barang yang belum sesuai dengan standar dan belum mengurus perizinan. Maka dari itu Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi mendorong pelaku UMKM untuk mengelola barang produksi sesuai dengan standar dan kualitas, dan diharapkan konsumen yang berbelanja produk UMKM di Kota Bukittinggi puas dengan standar yang dihasilkan UMKM.

UMKM yang ingin menjalankan usaha sangat penting untuk memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.¹¹ Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha baik yang berskala mikro kecil, menengah, maupun besar.

¹¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021> diakses tanggal 27 Juli 2024 pukul 01.34 WIB

Syarat untuk membuat Nomor Induk Berusaha adalah KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat keterangan usaha, dan surat izin usaha mikro kecil dan menengah.

Tabel 1. 6
Data Jumlah UMKM yang Memiliki NIB

Tahun	Jumlah	Persentase
2019 – 2022	5.951	20,45%
2023	4.507	60,31%
Total	10.458	

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

Berdasarkan data yang tercatat, jumlah UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kota Bukittinggi menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019–2022, sebanyak 5.951 pelaku UMKM tercatat memiliki NIB yang mencakup sekitar 20,45% dari total UMKM yang ada. Angka ini mencerminkan bahwa meskipun ada sejumlah UMKM yang sudah terdaftar secara formal dengan NIB dan sebagian besar masih belum memiliki identitas usaha yang sah menurut regulasi pemerintah.

Namun, pada tahun 2023 jumlah UMKM yang memiliki NIB meningkat pesat menjadi 4.507 UMKM dengan persentase 60,31% dari total UMKM yang terdaftar. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman kalangan pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki NIB sebagai syarat legalitas usaha yang juga mempermudah akses mereka dalam mengurus legalitas usahanya.

Tabel 1. 7
Anggaran Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja
Kota Bukittinggi dalam Pembinaan UMKM

No	Tahun	Kegiatan	Anggaran
1.	2023	Kegiatan usulan program musyawarah rencana pembangunan kecamatan dan Kelurahan	Rp. 219.179.700
		Kegiatan usulan program pokok pikiran (pokir) anggotan dewan perwakilan daerah kota bukittinggi	Rp. 342.996.100
		Kegiatan program prioritas wali kota	Rp. 510.964.200
		Pameran	Rp. 60.000.000
		Alokasi tabungan ustman	Rp. 2.500.000.000
2.	2024	Pelatihan mellenial enterpreneur	Rp. 174.101.000
		Pelatihan manajemen usaha	Rp. 151.252.800
		Pelatihan peningkatan kapasitas	Rp. 62.760.800
		Pameran	Rp. 60.000.000
		Alokasi tabungan ustman	Rp. 2.500.000.000
Jumlah			Rp. 6.581.254.600

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas anggaran Program Pedang Tigo Dinas Koperasi, UKM, dan, Tenaga Kerja Kota Bukittinggi diberikan dana oleh DPRD Kota Bukittinggi. Anggaran dana ini didapat dari anggaran ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan sumber utama pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Setelah melalui proses perencanaan dan pengajuan, anggaran tersebut dialokasikan ke Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sesuai dengan prioritas program. Pengalokasian anggaran bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan program, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Secara teoritis keberhasilan implementasi sebuah kebijakan atau program menurut Van Metter dan Van Horn salah satunya tergantung pada bagaimana kejelasan dan tujuan kebijakan atau program tersebut.¹² Meskipun program Pedang Tigo Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi memiliki ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas, tetapi yang terjadi dilapangan masih menghadapi beberapa kendala terutama dalam sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya sosialisasi dari Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam mensosialisasikan program, kurangnya literasi masyarakat dalam mengetahui program dan sasaran program kurang tepat.

Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu program sangat dipengaruhi oleh standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan terbagi atas dua macam yaitu kejelasan dan keadilan.¹³ Pada Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, kendala yang di hadapi yaitu ketidakadilan pada pelaku UMKM. Ketidakadilan pada pelaku UMKM mengakibatkan program yang di jalankan pada dinas ini kurang terlaksana dengan maksimal.

“Kami para pelaku UMKM di pasar atas tidak mendapatkan informasi tentang adanya pelatihan yang sedang dijalankan. Pelatihan itu hanya di beritahukan hanya kepada pelaku UMKM yang sering ikut serta saja”

¹² Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. P-ISSN 2355-309X; E-ISSN 2622-8696 Jurnal Reformasi Administrasi

¹³ Ibid halaman 5

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwasanya masih adanya perlakuan ketidakadilan pada sesama pelaku UMKM di Kota Bukittinggi. Ketidakadilan ini membuat para pelaku UMKM merasa dibeda-bedakan antara pelaku UMKM yang aktif dengan kurang aktif, menyebabkan adanya kesenjangan informasi. Hal ini berdampak pada ketidakmerataan akses terhadap informasi yang menyebabkan peluang dan dukungan yang tersedia mempersulit pelaku UMKM yang kurang aktif untuk berkembang.

Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu program sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang ada didalamnya salah satunya sumber daya manusia.¹⁴ Pada Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, kendala yang di hadapi yaitu kurangnya SDM pada Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.

Kekurangan SDM pada Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi mengakibatkan program yang di jalankan pada dinas ini kurang terlaksana dengan maksimal.

“Salah satu tantangan yang kami hadapi yaitu kekurangan staff pada dinas, kekurangan ini karena adanya pemecahan antara dinas koperasi, ukm dan perdagangan sekarang menjadi dinas koperasi ukm dan ketenagakerjaan. Sementara itu, tanggung jawab kami untuk memberikan pembinaan dan dukungan kepada pelaku UMKM cukup besar.” (hasil wawancara dengan salah satu staff dinas)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya kekurangan sumber daya manusia pada Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota

¹⁴ Ibid halaman 5

Bukittinggi. Hal ini disebabkan oleh staff yang dibutuhkan pada Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebanyak 56 orang sedangkan staff yang ada pada saat ini di Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi hanya 39 orang. Dengan keterbatasan SDM yang ada Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi kesulitan untuk menjangkau seluruh pelaku UMKM di Bukittinggi dan mengoptimalkan program-program pemberdayaan yang sudah ada.

Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu program juga dipengaruhi oleh komunikasi antar organisasi.¹⁵ Pada Dinas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan Kota Bukittinggi, kendala yang dihadapi yaitu kurangnya komunikasi antar dinas dengan pelaku UMKM di Kota Bukittinggi. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Bukittinggi.

“Walaupun ibuk salah satu pelaku UMKM yang sering diikuti sertakan dalam pelatihan yang ada pada dinas tetapi ibuk tidak mengetahui dengan adanya program ini”

Wawancara diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Pedang Tigo ini kurang disosialisasikan dengan baik oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi kepada pelaku UMKM. Sehingga masih adanya pelaku UMKM yang tidak mengetahui dengan adanya program Pedang Tigo ini. Akibat kurangnya penginformasian tentang program ini, para pelaku UMKM kurang dapat memanfaatkan program Pedang Tigo ini untuk meningkatkan usaha dan

¹⁵ Ibid halaman 5

keterampilannya karena program yang kurang dipahami oleh para pelaku UMKM.

Van metter dan van horn menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu program sangat di pengaruhi oleh sikap impelementor dalam melaksanakan program kegiatan di lapangan.¹⁶ Sikap implementor dapat mempertimbangkan faktor disposisi implementor terhadap keberhasilan suatu program. Dengan adanya fenomena ini tentu saja dapat memepengaruhi bagaimana sikap implementor dalam pelaksanaan program pedang tigo ini. Dalam penelitian ini peneliti dapat mengetahui kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada pelaku UMKM. Hal ini dilihat dari pengakuan salah satu staff Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja.

“Kendala dalam pelaksanaan program pedang tigo sering disebabkan kurang sosialiasi dari dinas. Banyak diantara kami yang merasa bahwa sosialisasi terhadap pelaku UMKM jarang menjangkau seluruh pelaku UMKM yang seharusnya mendapatkan informasi mengenai program yang dijalankan dinas, dan pemberitahuan pelatihan hanya di infokan kepada lurah/ RT.” (wawancara dengan salah satu anggota Dinas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan Kota Bukittinggi)

Wawancara diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Pedang Tigo di lapangan masih terdapat kendala yaitu kurangnya sosialisasi dari Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja. Hal ini di sebabkan kurang tersampainya informasi kepada pelaku UMKM karena pemberitahuan informasi hanya diinformasikan kepada Lurah/RT pemberituannya terkadang tidak disebarluaskan atau hanya di informasikan lewat kader-kader tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dinas kurang optimal dalam menjalankan tugasnya. Sikap implementor seharusnya lebih aktif dalam menyebarluaskan Program Pedang Tigo ini.

¹⁶ Ibid halaman 6

Keikutsertaan pihak kelurahan dalam mendukung terwujudnya Program Pedang Tigo di Kota Bukittinggi memiliki peran yang cukup signifikan. Sebagai pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat, kelurahan turut serta dalam proses pendataan pelaku UMKM, menyosialisasikan program, serta merekomendasikan nama-nama pelaku usaha yang layak mengikuti program berdasarkan kondisi di lapangan. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), kelurahan juga berperan aktif dalam mengusulkan program pelatihan dan pembinaan UMKM yang menjadi bagian dari kegiatan Pedang Tigo. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah kota dan pemerintah kelurahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis masyarakat.

Hasil wawancara dengan salah satu aparat kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah mengungkapkan bahwa:

“Kami dari kelurahan sangat mendukung program Pedang Tigo ini karena memang memberikan dampak langsung ke pelaku UMKM. Setiap tahunnya kami mengajukan usulan pelatihan UMKM melalui Musrenbang, dan itu menjadi dasar dari pelaksanaan kegiatan. Kami juga bantu menginformasikan ke warga dan membantu mereka untuk melengkapi syarat seperti NIB atau surat keterangan usaha,” (Sekretaris Lurah ATTS).

Dengan adanya keterlibatan kelurahan, pelaksanaan program menjadi lebih tepat sasaran karena menjangkau pelaku UMKM yang memang membutuhkan dukungan, baik dalam hal penguatan kapasitas usaha maupun perluasan pasar.

Fenomena yang telah dijelaskan masih memiliki banyak kendala yang menghambat optimalisasi program Pedang Tigo. Implementasi kebijakan adalah proses penting dimana pelaksana berusaha mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Tanpa implementasi yang baik kebijakan yang sudah dirancang hanya akan menjadi arsip di sebuah kantor. Oleh karena itu, implementasi merupakan hal

yang sangat krusial dalam kebijakan publik.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, baik dari aspek empiris maupun teoritis, peneliti menyadari pentingnya mempelajari program pedang tigo pada Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dengan menggunakan teori Donald Van Metter dan Van Horn.

Berdasarkan rangkaian latar belakang diatas menjadi acuan bagi penulis dan juga penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan juga lebih luas lagi sehingga berbagai macam pertanyaan muncul tentang bagaimana implementasi Program Pedang Tigo Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi untuk meningkatkan daya saing UMKM di Kota Bukittinggi, sehingga penulis mengangkat judul “ **Implementasi Program Pedang Tigo Dinas Koperasi UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Kota Bukittinggi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah Bagaimana Implementasi Program Pedang Tigo Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Kota Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian Implementasi Program Pedang Tigo Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Kota

Bukittinggi bertujuan untuk mendapatkan gambaran serta menganalisis Implementasi Kebijakan program pedang tigo dalam meningkatkan daya saing UMKM di Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

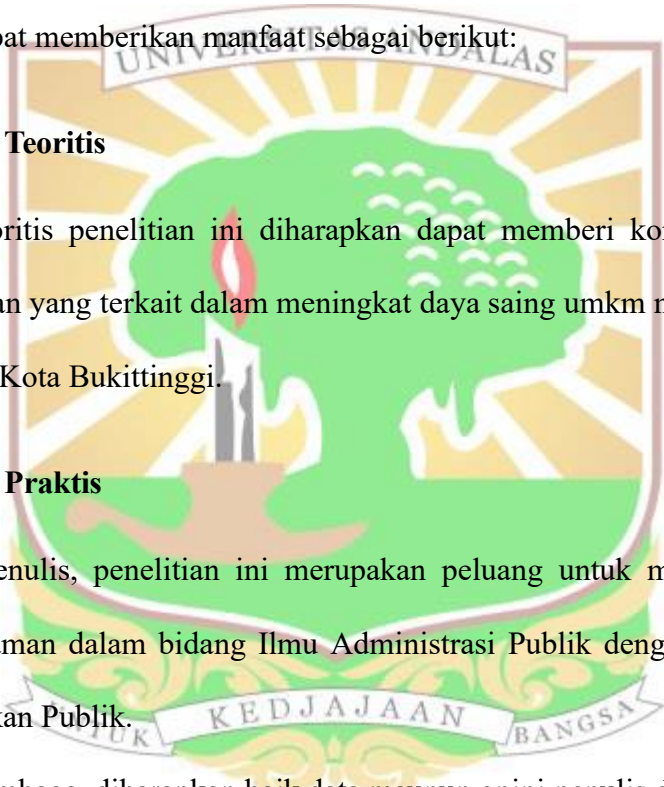
Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka hasil keseluruhan yang di peroleh nantinya dalam penelitian ini, sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam bidang keilmuan yang terkait dalam meningkat daya saing umkm melalui program pedang tigo di Kota Bukittinggi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan peluang untuk mengembangkan pemahaman dalam bidang Ilmu Administrasi Publik dengan konsenstrasi Kebijakan Publik.
- b. Bagi lembaga, diharapkan baik data maupun opini penulis dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi untuk menemukan medium yang tepat dalam mengatasi berbagai permasalahan pada UMKM dalam meningkatkan daya saing UMKM di Kota Bukittinggi.
- c. Bagi masyarakat umum, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan wawasan sehingga masyarakat dapat mengetahui program



Pedang Tigo Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.

